

**PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN NONFORMAL KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2017**

ARTIKEL JURNAL

Diajukan kepada Fakultas Ilmu
Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



Oleh
Afirsta Alviana Dewi
NIM 14101244010

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN
JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
MEI 2018**

PERSETUJUAN

Artikel jurnal sebagai hasil dari tugas akhir skripsi yang berjudul “PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN NONFORMAL KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017” yang disusun oleh AFIRSTA ALVIANA DEWI, NIM 14101244010 ini telah disetujui oleh pembimbing untuk di-*upload*.

Yogyakarta, Mei 2018
Pembimbing



Tina Rahmawati, M.Pd.
NIP 19800720 200312 2 001

PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN NONFORMAL KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017

MAPPING OF NONFORMAL EDUCATION QUALITY OF GUNUNGKIDUL REGENCY IN 2017

Oleh: Afirista Alviana Dewi, Prodi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, (afirstaadewii@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan capaian mutu pendidikan nonformal di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 berdasarkan ketercapaian dan ketidaktercapaian SNP. Penelitian ini menggunakan metode analisis data sekunder yang bersumber dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul. Hasil penelitian ini adalah capaian mutu pendidikan nonformal Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 belum memenuhi SNP yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut: (1) Capaian mutu PAUD dan PKBM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 dikategorikan menuju SNP level 3, sedangkan capaian mutu LKP Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 dikategorikan menuju SNP level 2. (2) Capaian mutu PAUD yang paling baik standar proses dan capaian mutu yang paling rendah standar pendidik dan tenaga kependidikan. (3) Capaian mutu yang paling baik pada PKBM adalah standar kompetensi lulusan (SKL) dan capaian mutu yang paling rendah standar sarana dan prasarana. (4) Capaian mutu yang paling baik LKP adalah standar kompetensi lulusan (SKL) dan capaian mutu yang paling rendah standar pendidik dan tenaga kependidikan.

Kata kunci: *Pemetaan mutu, pendidikan nonformal*

Abstract

This research aims to mapping the achievement of nonformal education quality in Gunungkidul Regency in 2017 based on the achievement and non-achievement of SNP. This research uses secondary data analysis method that is sourced from Youth Education Department and sport of Gunungkidul Regency. The result of the research shows that nonformal education quality achievement of Gunungkidul regency hasn't fulfilled the SNP which has been determined with the following details: (1) the quality of units and/or PAUD and PKBM program of Gunungkidul Regency in 2017 is generally categorized toward SNP level 3, while the quality achievement of LKP of Gunungkidul Regency in 2017 is categorized to SNP level 2; (2) the best quality achievement in the early childhood program is on the process standard and the lowest quality achievement is at the standard of educator and educational staff; (3) the best quality achievement in PKBM is on the graduate competency standard (SKL) and the lowest quality achievement is on the standard of facilities and infrastructure; (4) the best quality achievement of LKP is on the graduate competency standard (SKL) and the lowest quality achievement is at the standard of educator and educational staff.

Keyword: *Quality mapping, nonformal education*

PENDAHULUAN

Jumlah penduduk di Indonesia yang terus bertambah secara kuantitas perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas melalui sebuah pendidikan. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 mencapai 236 juta (Sensus penduduk 2010), jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 274 juta orang pada tahun 2025. Kondisi tersebut mengarahkan Indonesia pada terjadinya 'bonus

demografi' dimana jumlah penduduk usia produktif menjadi lebih besar daripada jumlah penduduk dengan usia nonproduktif. Akibatnya, perlu sebuah upaya pengendalian kuantitas dan kualitas SDM seiring dengan laju pertumbuhan penduduk untuk terciptanya keseimbangan (Ditbinsuslat, 2016:1).

Pendidikan adalah pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia. Melalui pendidikan kehidupan manusia dapat terpenuhi kebutuhannya. *The notion of nonformal*

education (NFE) has been a significant feature of policy debates around education in many countries for three decades. It has drawn attention to the importance and potential of education, learning and training that takes place outside recognized educational institutions. The term nonformal education is broad and loosely defined to include all education outside the school system with no parameters of time and space. It includes all learning and training that takes place outside recognized educational institutions (Jumani et al, 2011). Artinya bahwa gagasan pendidikan nonformal telah menjadi perdebatan penting tentang kebijakan pendidikan di banyak negara selama tiga dekade terakhir. Pendidikan yang penting dan berpotensi, pembelajaran dan pelatihan yang dilaksanakan di luar pendidikan yang diakui menjadi sesuatu hal yang menarik. Syarat pendidikan nonformal yang luas dan longgar didefinisikan untuk memasukkan semua pendidikan di luar sistem sekolah tanpa parameter ruang dan waktu. Hal ini mencakup semua pembelajaran dan pelatihan yang berlangsung di luar institusi pendidikan yang diakui.

Non-formal educational institution aim to provide education by bringing the students nearer to the beautiful characteristics in human life, for in the culture of the arts, human life is the highest form of living things as compared to any living creature. The education system in Indonesia clearly states that the national education aims to improve the quality of Indonesians and that is the man who is faithful to the Almighty God, virtuous, has good character, independent, advanced, powerful, intelligent, creative, skilled, disciplined, has work ethic, responsible, professional, and

productive, as well as physical and spiritual (Fazli, 2014).

Menurut Nurlayli dalam Abdulhak dan Suprayogi (2013:48) tujuan dari dilaksanakannya pendidikan nonformal adalah sebagai perwujudan untuk menyelenggarakan pendidikan sepanjang hayat bagi masyarakat. Pendidikan nonformal bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental kepada peserta didik tertentu untuk membantu mengembangkan dirinya, melanjutkan pendidikan lanjutan serta untuk bekal mencari nafkah kehidupannya juga memenuhi kebutuhan belajarnya yang tidak terpenuhi di jalur pendidikan persekolahan formal. Jadi pendidikan nonformal bertujuan untuk memenuhi hak belajar masyarakat yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan juga berperan untuk membantu mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat memenuhi kebutuhan kehidupannya.

Pembangunan PAUD dan Dikmas oleh karenanya harus mampu menjadi jawaban dalam menghadapi tantangan nasional dan global. Permendikbud Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BP PAUD dan Dikmas, menyebutkan bahwa PAUD dan Dikmas dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui program pembangunan potensi anak usia dini secara holistik. Selain itu, PAUD dan Dikmas dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, sarana pengembangan kecakapan hidup, dan sarana pengembangan pendidikan keluarga untuk

membentuk karakter dan budaya bangsa. Memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan tuntutan kualitas hidup yang semakin meningkat, PAUD dan Dikmas juga menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini juga berimplikasi terhadap tuntutan masyarakat akan layanan PAUD dan Dikmas yang berkualitas.

Kabupaten Gunungkidul merupakan bagian dari kesatuan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Letak geografisnya didominasi dataran tinggi berkapur dengan luas wilayah administratif 46,63% dari keseluruhan luas DIY atau sekitar 1.485,36 km². Jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul tahun 2016 berjumlah 722.479 dengan status kemiskinan penduduknya 19,34% (BPS, 2017).

Berdasarkan hal tersebut, sebenarnya Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi SDM dan SDA yang lebih besar apabila dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain di Provinsi DIY. Akan tetapi, data di lapangan menunjukkan dalam beberapa aspek, Kabupaten Gunungkidul menempati posisi terendah dari 4 kabupaten dan 1 kota lainnya. Hal ini dikarenakan salah satu faktor keterjangkauan wilayahnya yang sangat sulit. Sebagai contoh, Desa Songbanyu Kecamatan Girisubo jarak menuju ibukota Kabupaten berjarak 60 KM. Hal ini menjadi bukti bahwa keterjangkauan wilayah di Kabupaten Gunungkidul ini sangat sulit.

Data yang ada di lapangan menunjukkan bahwa di Kabupaten Gunungkidul masih terdapat angka siswa putus sekolah yang masih tinggi. Tidak lagi

disebabkan karena faktor geografis dan ekonomi, tetapi lebih karena faktor lingkungan yang memaksa mereka tidak melanjutkan sekolah. Dari hal tersebut, maka urgensi pendidikan nonformal di kabupaten Gunungkidul sebagai lembaga pendidikan pengganti, pendukung dan pendamping dari pendidikan formal menjadi sangat penting. Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah 1,197 lembaga PAUD yang terdiri dari satuan dan/atau program PAUD baru 14,3% nya saja yang terakreditasi. Dari 67 lembaga PKBM yang ada di Kabupaten Gunungkidul, hanya 3 lembaga saja yang sudah terakreditasi dan untuk lembaga LKP baru 11,5% nya saja yang terakreditasi dari total lembaga LKP berjumlah 26 lembaga (Dapodik, 2018).

Dari hal hal tersebut, dapat diketahui bahwa keberadaan pendidikan nonformal di Kabupaten Gunungkidul itu menjadi wajib mengingat keberadaan pendidikan formal yang termasuk kategori bermutu sangat sulit dijangkau untuk masyarakat yang berada di pinggiran.

Disisi lain, di Kabupaten Gunungkidul satuan pendidikan baik PAUD, PKBM dan LKP masih banyak yang mengalami kesulitan dalam memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan. Berdasarkan observasi yang dilakukan diawal penelitian menunjukkan bahwa masih banyak PAUD, LKP dan PKBM yang belum terakreditasi, selain itu lembaga pendidikan mengalami hambatan untuk memenuhi standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana.

Berdasarkan pengertian diatas, maka pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan merupakan upaya untuk mengetahui tingkat kelayakan menurut SNP. Parameter kelayakan ini adalah indikator-indikator SNP yang dirumuskan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) yang meliputi delapan standar. Semakin sesuai dengan indikator-indikator tersebut, Satuan pendidikan semakin layak sebagai penyelenggara program pendidikan.

Berdasarkan hal-hal diatas, judul penelitian ini adalah **“Pemetaan Mutu Pendidikan Nonformal Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017”** yang kemudian difokuskan pada peta capaian mutu pendidikan satuan dan/atau program PAUD serta satuan dan/atau program Pendidikan Masyarakat (PKBM dan LKP) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana ketercapaian mutu pendidikan satuan dan/atau program PAUD dan Dikmas Kabupaten Gunungkidul tahun 2017 berdasarkan ketercapaian dan ketidaktercapaian Standar Nasional Pendidikan?. Dengan begitu, tujuan dari penelitian ini untuk memetakan capaian mutu dataun dan/atau program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 berdasarkan Ketercapaian dan Ketidaktercapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP).

METODE PENELITIAN

Jenis

Berdasarkan judul penelitian yaitu “Pemetaan Mutu Pendidikan Nonformal Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017”, maka jenis penelitiin yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan rancangan penelitian deskriptif. Metode yang digunakan yaitu analisis data sekunder.

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul pada Bulan Maret-April 2018.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Pada penelitian ini, metode dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data sekunder. Menurut Sukmadinata (2006:221) teknik dokumentasi yang disebut sebagai studi dokumenter adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun lektronik. Pada penelitian ini tidak menggunakan data primer dalam pengolahannya tetapi menggunakan data sekunder. Data sekunder ini adalah data-data yang berupa dokumen yang diperoleh dari suatu instansi tertentu atau bisa juga didapat dari tempat instansi lain yang masih bersangkutan dengan instansi tersebut.

Data atau dokumen yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data yang telah diverifikasi

oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul yaitu data hasil pengisian instrumen Evaluasi Diri Sekolah oleh lembaga pendidikan dimana data ini diperoleh dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif yaitu data yang telah dihimpun oleh peneliti kemudian dihitung secara sederhana dengan menggunakan matematik (hitungan sederhana) seperti menjumlah, mengurangi, membagi, mengkalikan, mempersen dan membandingkan termasuk menyajikan hasil perhitungan ke dalam tabel, diagram, baru kemudian hasil tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Peneliti menghitung data untuk memperoleh nilai rata-ratanya sehingga terlihat kuantitas ketercapaian mutu PAUD dan Dikmas pada bagian-bagian tertentu. Skor nilai yang diberikan pada setiap sub indikator yaitu, 0 apabila tidak memenuhi sub indikator, dan diberi nilai 7 apabila memenuhi sub indikator.

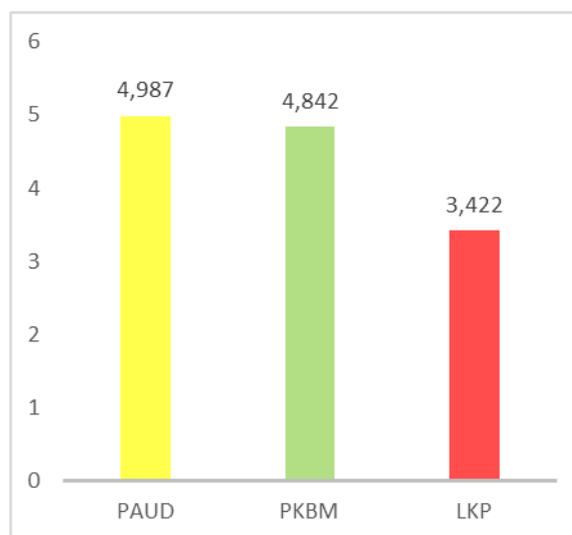
Melalui analisis data kuantitatif tersebut peneliti dapat menggambarkan keadaan atau Capaian Mutu Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan ketercapaian dan ketidaktercapaian Standar Nasional Pendidikan, sehingga pihak yang bersangkutan dapat menggunakannya sebagai bahan acuan dalam melakukan perencanaan perbaikan juga dasar pengambilan kebijakan pendidikan dimasa yang akan datang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil capaian mutu SNP yang didasarkan pada 8 standar menurut satuan dan/atau program pendidikan nonformal di Kabupaten Gunungkidul tahun 2017 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Tabel 1 Capaian Mutu Pendidikan Nonformal Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017

Satuan/Program	Skor Rata-rata	Ket
PAUD	4,987	Menuju SNP 3
PKBM	4,842	Menuju SNP 3
LKP	3,422	Menuju SNP 2



Gambar 1 Perbandingan Capaian Mutu SNP Pendidikan Nonformal Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017

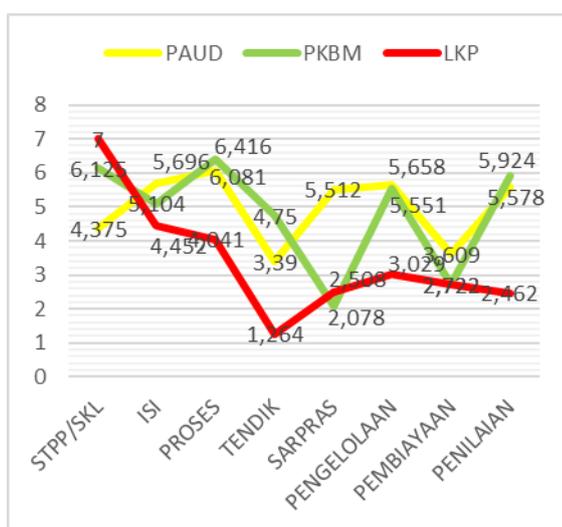
Bila dilihat nilai skor mutunya, capaian mutu SNP baik satuan dan/atau program PAUD maupun Pendidikan Masyarakat (PKBM dan LKP) di Kabupaten Gunungkidul dikategorikan menuju SNP level 3. Secara umum dapat disimpulkan capaian mutu pendidikan di

Kabupaten Gunungkidul belum dapat mencapai SNP. Skor mutu yang paling tinggi dimiliki oleh Satuan dan/atau Program PAUD yaitu sebesar 4,987, sementara skor mutu yang paling rendah dimiliki oleh satuan dan/atau program Dikmas (LKP), yaitu sebesar 3,422.

Adapun perbandingan capaian mutu SNP Kabupaten Gunungkidul untuk masing-masing standar digambarkan berikut:

Tabel 2 Perbandingan Capaian Mutu SNP Pendidikan Nonformal Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 pada Setiap Standar

Standar	PAUD	PKBM	LKP
STTP/S KL	4,375	6,125	7
Isi	5,696	5,104	4,452
Proses	6,081	6,416	4,041
Tendik	3,390	4,750	1,264
Sarpras	5,512	2,078	2,508
Pengelolaan	5,658	5,551	3,026
Pembiayaan	3,609	2,722	2,722
Penilaian	5,578	5,924	2,462



Gambar 2 Perbandingan Capaian Mutu SNP Pendidikan Nonformal Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 pada Setiap Standar

Hasil dari olahan data tersebut adalah bahwa capaian mutu pendidikan nonformal di Kabupaten Gunungkidul belum mencapai SNP, yaitu capaian mutu PAUD di Kabupaten Gunungkidul tahun 2017 berada pada angka 4,987 atau berada pada posisi SNP level 3. Capaian mutu PKBM di Kabupaten Gunungkidul juga masih berada di level 3 dengan capaian skor rata-rata mutu 4,842, sedangkan untuk capaian mutu LKP di Kabupaten Gunungkidul, skor rata-rata mutu masih di angka 3,422 atau berada pada SNP level 2. Pendidikan nonformal dikatakan memenuhi SNP ketika lembaga mempunyai capaian skor rata-rata mutu 6,66 sampai dengan 7,0 dalam setiap standarnya.

Digambarkan lebih detail lagi, berdasarkan data EDS tersebut diketahui bahwa terdapat indikator-indikator pada setiap standar PAUD, PKBM dan LKP yang belum terpenuhi ataupun yang telah terpenuhi. Hal tersebut diketahui dari capaian lembaga yang masih lemah pada pencapaian indikator tersebut atau bahkan belum tercapai.

Pada satuan dan/atau program PAUD, diketahui bahwa capaian standar yang paling baik adalah pada standar proses dimana skor rata-rata lembaga telah mencapai angka 6,081 dari capaian maksimal 7,0. Sedangkan pada satuan dan/atau program PAUD, standar yang paling lemah adalah pada standar pendidik dan tenaga kependidikan dengan capaian skor rata-rata lembaga 3,390.

Pada standar pendidik dan tenaga kependidikan PAUD kabupaten Gunungkidul

tersebut, indikator yang paling lemah ada pada pencapaian standar tenaga kependidikan yaitu pada pemenuhan kompetensi tenaga kependidikan. Berdasarkan Standar PAUD pada Bab VII tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, disebutkan bahwa Tenaga Kependidikan anak usai dini merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan dan/atau program PAUD. Tenaga kependidikan terdiri atas pengawas TK/RA/BA, Penilik KB/TPA/SPS, Kepala PAUD (TK/RA/BA/KB/TPA/SPS), tenaga administrasi dan tenaga penunjang lainnya.

Dijelaskan lebih lanjut, kompetensi pengawas atau penilik PAUD mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi penelitian dan pengembangan, kompetensi supervisi akademik, dan kompetensi evaluasi pendidikan. Kompetensi kepala lembaga PAUD, mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi supervisi. Sedangkan untuk kompetensi tenaga administrasi satuan dan/atau program PAUD mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi manajerial.

Pada capaian mutu standar pendidik dan tenaga kependidikan PAUD Kabupaten Gunungkidul tahun 2017 tersebut, lembaga PAUD sebagian besar belum memenuhi indikator yang telah ditetapkan diantaranya adalah indikator kompetensi pendidik dan tenaga

kependidikan. Masih banyak lembaga PAUD di Kabupaten Gunungkidul yang kesulitan untuk memenuhi standar yang telah dipersyaratkan untuk seorang pendidik dan tenaga kependidikan di lembaganya. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh sulitnya menemukan SDM yang sesuai dengan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Gunungkidul.

Hal yang seperti ini yang seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, terkhusus bagi Dinas Dikpora Kabupaten Gunungkidul sendiri untuk meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. Pihak dinas, dapat menyelenggarakan diklat-diklat atau pelatihan-pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dengan materi-materi yang bervariasi yang bertujuan untuk menambah kemampuan akademik dan kompetensi yang dimiliki pendidik dan tenaga kependidikannya. Selain itu, dinas dikpora juga dapat memberikan kesempatan pada pendidik dan tenaga kependidikan PAUD untuk meneruskan pendidikan lanjutan dengan mengikutkan program PPG, PLPG atau sejenisnya.

Selain itu, dari pihak lembaga sendiri, dapat memperbaiki sistem perekrutan tenaga pendidik dan kependidikannya dengan cara menerapkan sistem perekrutan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, dengan begitu lembaga akan dapat memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang harus dimiliki oleh sebuah lembaga satuan dan/atau program PAUD. Terdapat beberapa kasus yang ditemukan di

lapangan menunjukkan bahwa proses perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan di sini masih menerapkan sistem kekerabatan dengan mengesampingkan profesionalitas. Hal inilah yang juga turut mempengaruhi mengapa capaian SNP pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Gunungkidul masih rendah.

Selanjutnya pada satuan dan/atau program pendidikan masyarakat khususnya pada penyelenggaraan PKBM, capaian mutu SNP PKBM di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2017 masih berada pada level 3 dengan capaian skor rata-rata sebesar 4,842 dengan capaian standar yang paling baik pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) skor rata-rata mutu sebesar 6,125. Sedangkan capaian standar yang paling lemah adalah standar sarana dan prasarana lembaga dengan capaian skor rata-rata mutu 2,078.

Pada standar SKL, PKBM yang ada di Kabupaten Gunungkidul secara umum sudah mampu memenuhi indikator yang ditetapkan, lembaga-lembaga telah memiliki acuan yang kuat untuk dapat menyelenggarakan kegiatan di PKBM. Pada standar sarana dan prasarana pada PKBM di wilayah kabupaten Gunungkidul masih banyak yang terkendala dalam pemenuhan indikator-indikator pada setiap standarnya. Indikator-indikator tersebut diantaranya kondisi peralatan pembelajaran, ketersediaan bahan ajar, ketersediaan peralatan praktik, jenis dan luas ruangan, serta status kepemilikan lahan dan bangunan.

Dalam penyelenggaraan PKBM telah jelas disebutkan dalam Standar PKBM bahwa PKBM harus memiliki peralatan pembelajaran

yang layak pakai untuk setiap jenis program pendidikan yang diselenggarakan. Program PKBM harus memiliki bahan ajar dengan jumlah yang cukup memadai untuk setiap jenis program pendidikan yang diselenggarakan. Selain itu PKBM seharusnya memiliki judul bahan ajar yang sesuai untuk setiap jenis program pendidikan yang diselenggarakan. Program PKBM juga seharusnya memiliki peralatan praktik yang sesuai dengan jenis program pendidikan yang diselenggarakan.

Selain itu, untuk pemenuhan standar prasarana dalam penyelenggaraan PKBM, satuan PKBM harus menggunakan ruang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan program pendidikan yang diselenggarakan. Satuan PKBM juga harus memiliki status kepemilikan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk lahan dan bangunan yang digunakan.

Kenyataan di lapangan, sebagian besar lembaga PKBM memiliki keterbatasan pada pemenuhan kebutuhan peralatan pembelajaran untuk menunjang dan mendukung kegiatan pembelajaran. PKBM diselenggarakan dengan sederhana yang hanya mementingkan tersampainya pesan dan pendidikan itu sendiri. Keberadaan lembaga, status kepemilikan dari PKBM pun tidak jarang ada yang tidak jelas. PKBM diselenggarakan di rumah dari salah satu warga atau pengurus, terkadang juga menumpang di bangunan sekolah formal yang ada di wilayahnya.

Berdasarkan hal tersebut, pihak yang berwenang di Kabupaten Gunungkidul harapannya dapat memperhatikan keberadaan PKBM di wilayahnya dengan cara melakukan

pendampingan atau sosialisasi kepada masyarakat umum sekitar lembaga pendidikan untuk dapat turut serta berpartisipasi dalam proses belajar mengajar di PKBM. Masyarakat sekitar didorong untuk bekerjasama membantu pemenuhan sarana dan prasarana lembaga.

Mengingat urgensi keberadaan lembaga pendidikan nonformal yang bermutu, khususnya satuan dan/atau program PKBM Hal ini disebabkan karena berbagai permasalahan pendidikan yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul, salah satunya adalah letak geografis yang sangat luas dengan keberadaan sarana pendidikan formal dengan kategori bagus berada di pusat kota kabupaten, harusnya keberadaan pendidikan nonformal khususnya PKBM dapat dijadikan oasis ditengah padang pasir. PKBM dapat menjadi ujung tombak solusi untuk mengatasi masyarakat yang tidak dapat menjangkau pendidikan formal dan untuk menampung masyarakat pinggiran pesisir pantai yang putus sekolah.

Kebutuhan PKBM yang bermutu menjadi suatu kewajiban demi terwujudnya SDM Kabupaten Gunungkidul yang lebih baik. Dengan penyediaan dan pemenuhan standar sarana dan prasarana harapannya dapat meningkatkan pula kualitas pendidikan yang diselenggarakan PKBM. Sarana dan prasarana menjadi penting untuk dipenuhi supaya dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal kedepan tidak terdapat hambatan dan permasalahan. Selain itu dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, akan dapat mendorong pelajarnya memenuhi kebutuhannya dalam belajar.

Pada capaian mutu LKP di Kabupaten Gunungkidul tahun 2017, mutu LKP masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan PAUD dan PKBM. Skor capaian rata-rata mutu LKP Kabupaten Gunungkidul tahun 2017 berada pada skor 3,422. Dari skor tersebut, capaian standar SKL dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di LKP adalah menjadi yang terbaik dengan capaian skor rata-rata mutu 7,0 atau memenuhi SNP dengan sempurna. Sedangkan capain standar yang paling rendah adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan, dengan skor rata-rata mutu 1,264 di setiap lembaganya.

Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan di KP Kabupaten Gunungkidul seharusnya menjadi kekuatan yang harus terus dipertahankan agar nantinya keberadaan LKP yang bermutu di kabupaten Gunungkidul dapat segera terwujud. Dari 6 lembaga yang menjadi sasaran dalam kegiatan pemetaan mutu pendidikan nonformal ini, seluruhnya telah memenuhi standar SKL yang dipersyaratkan dengan telah memenuhi indikator-indikator yang dipersyaratkan di dalamnya.

Pada standar pendidik dan tenaga kependidikan LKP di Kabupaten Gunungkidul, lembaga LKP sebagian besar masih kesulitan dalam memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi penguji, dimana penguji disini menjadi tokoh penting untuk dapat meluluskan siswanya sesuai dengan kriteria yang distandarkan.

Penguji di LKP bertugas untuk dapat menguji siswa yang mengikuti program pendidikan dan pelatihan di LKP dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan Standar penyelenggaraan LKP, Penguji diantaranya harus memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV) yang diperoleh dari perguruan tinggi terakreditasi. Selain itu penguji harus memiliki sertifikat kompetensi keahlian dalam bidang yang relevan yang dikeluarkan oleh instansi yang kompatibel. Akan tetapi, pada kenyataannya, LKP di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2017 belum mampu memenuhi standar tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa mutu pendidikan nonformal di Kabupaten Gunungkidul masih dikategorikan lemah yaitu terbukti dengan pencapaian SNP masih di level 3 untuk PAUD dan PKBM, serta di level 2 untuk LKP. Dalam hal ini, pendidikan nonformal di Kabupaten Gunungkidul masih membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah-pemerintah setempat untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang dari pencapaian SNP yang telah ditetapkan tersebut. Selain itu pemerintah juga harus bekerja sama dengan lembaga untuk dapat mempertahankan kekuatan-kekuatan serta potensi yang telah dimiliki atau pada saat ini telah berada pada level yang sudah bagus, karena kekuatan tersebut dapat dijadikan modal untuk perbaikan pendidikan nonformal di Kabupaten Gunungkidul.

Selain itu, pemerintah dapat meningkatkan kualitas pendampingannya terhadap lembaga pendidikan, sehingga dengan memperbaiki kualitas pendampingan terhadap lembaga pendidikan secara langsung selain dapat menjadi sarana evaluasi, pendampingan juga dapat menjadi sarana memberi perhatian kepada

lembaga pendidikan. Harapannya dengan pendampingan, lembaga menjadi patuh dan disiplin untuk memenuhi standar dalam penyelenggaraan pendidikannya dan termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pemetaan mutu pendidikan nonformal Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 didasarkan pada ketercapaian dan ketidaktercapaian SNP dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan bahwa capaian mutu Pendidikan Nonformal Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 belum memenuhi SNP yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut: 1) Capaian mutu SNP satuan dan/atau program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 secara umum dikategorikan menuju SNP level 3. Capaian mutu yang paling baik adalah pada standar proses, dan capaian mutu yang paling rendah ada pada standar pendidik dan tenaga kependidikan; 2) Capaian mutu SNP Satuan dan/atau Program Pendidikan Masyarakat (Dikmas) pada penyelenggaraan PKBM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 secara umum dikategorikan menuju SNP level 3.

Capaian mutu yang paling baik adalah pada standar kompetensi lulusan (SKL) dan capaian mutu yang paling rendah ada pada standar sarana dan prasarana; 3) Capaian mutu SNP satuan dan/atau Program Pendidikan Masyarakat (Dikmas) pada penyelenggaraan LKP Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 secara umum dikategorikan menuju SNP level 2. Capaian mutu yang paling baik adalah pada standar kompetensi lulusan (SKL) dan capaian mutu yang paling rendah ada pada standar pendidik dan tenaga kependidikan.

A. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah, Dinas yang berwenang

- a. Meningkatkan perhatian yang dapat berwujud pendampingan, pembinaan, pembimbingan kepada lembaga-lembaga pendidikan, monitoring rutin dan visitasi lembaga yang terencana terhadap penyelenggaraan pendidikan, dll dari pihak-pihak yang berwenang untuk pendidikan nonformal yang ada di Kabupaten Gunungkidul;
- b. Memberi pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat umum berwujud pendampingan, sosialisasi, dan monitoring untuk membantu penyelenggaraan pendidikan nonformal, khususnya

penyediaan sarana lahan, ataupun gedung untuk penyelenggaraan pendidikan.

- c. Pemberian kesempatan kepada tenaga pendidik dan kependidikan pendidikan nonformal untuk memperoleh, menambah, dan meningkatkan prestasi, kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pendidik atau tenaga kependidikan pendidikan nonformal.

2. Untuk Satuan Lembaga Pendidikan

- a. Mengaktifkan dan mengefektifkan kegiatan musyawarah atau rapat-rapat sejenis, sebagai forum pengembangan lembaga atau jaringan kerjasama secara optimal. Hasil kajian mengenai sumber-sumber masalah atau sumber kesulitan pada level lembaga diagendakan untuk didiskusikan dan dicarikan solusi dengan cara saling berbagi pengalaman memecahkan masalah di lembaga masing-masing.
- b. Lembaga menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan masyarakat sekitar lembaga pendidikan, terlebih dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan dan ketersediaan layanan pendidikan nonformal. Komunikasi dapat berwujud kerjasama pemenuhan fasilitas pendidikan yang layak, misalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung untuk kegiatan pendidikan masyarakat.
- c. Lembaga pendidikan nonformal membangun dan menjaga komitmen budaya pendidikan yang unggul dan

bermutu dengan cara konsisten menerapkan manajemen budaya unggul dan bermutu yang terukur dan terarah di dalam lembaga pendidikan. Contohnya menjaga dan meningkatkan potensi yang dimiliki lembaga, berorientasi pada ketercapaian tujuan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan.

Permendikbud Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BP PAUD dan Dikmas.

Sani, R.A., Isda Pramuniarti, Anies Mucktiany. (2015). *Penjaminan mutu sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sukmadinata, N.S. (2016). *Metode penelitian*. Bandung: Rosdakarya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

BPS Kabupaten Gunungkidul. (2017). *Gunungkidul dalam angka 2017*. Diunduh pada tanggal 3 April 2018 dari <https://gunungkidulkab.bps.go.id/publication/2017/08/14/243a4ad46eded8d4f286537f/kabupaten-gunung-kidul-dalam-angka-2017.html>

Ditbinsuslat. (2016). Diakses pada tanggal 26 Februari 2018 pada jam 23.47 WIB di www.paud-dikmas.kemdikbud.go.id

Jumani, N.B., Rahman, F. & Bibi, K. (2011). *Potential of non formal basic education in promoting women education in Pakistan*. International Journal of Instruction, 4(1), 17-32.

Kemdikbud. (2016). *Juknis pemetaan mutu program dan/atau satuan PAUD dan Dikmas*. Jakarta: Kemdikbud.

Mamun, A.A. & Rahman, A. (2013). *Non-formal education in improving quality of life of underprivileged Children*. Journal of Education and Learning, 7, 11-20.

Mulyasana, D. (2012). *Pendidikan bermutu dan berdaya saing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional pendidikan.